YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v5i6.8151

REPRESENTASI FEODALISME PESANTREN DALAM MEDIA TELEVISI: ANALISIS PEMBERITAAN TRANS7 DAN REALITAS SOSIAL DI PESANTREN AN-NUR 2 BULULAWANG MALANG

Representation of *Pesantren* Feudalism in Television Media: An Analysis of Trans7 News Coverage and Social Reality at Pesantren An-Nur 2 Bululawang Malang

Lailatur Rohanita, Kemal Husen, Mochamad Rizqy Romadhon, Alfatun Nisak, Lailatul Mufarrohah, Ali Mukhammad Abrori
Universitas Al-Qolam Malang
lailaturrohanita24@pasca.alqolam.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 23, 2025	Nov 15, 2025	Nov 27, 2025	Dec 2, 2025

Abstract

Pesantren feudalism as an issue of media representation has increasingly come to the fore in line with the widening gap between dramatized news coverage and the everyday realities of *pesantren* communities, particularly amid digital disruption that drives sensational narratives at the expense of factual accuracy. This study examines the media representation of *pesantren* feudalism in Trans7 news coverage and compares it with the social reality at Pesantren An-Nur 2 Bululawang, with the aim of analyzing how a feudal image is constructed in television reporting and how this construction intersects with, and often contradicts the educational, ethical, and cultural dynamics practiced within the *pesantren*. Using a qualitative approach with a case study design, data were obtained through broadcast document analysis, observation of the *pesantren* environment, and in-depth interviews with caregivers, *ustaz*, and *santri*, and subsequently analyzed interpretively. The findings reveal three

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

main patterns of media representation: symbolic dramatization of authority, selective emphasis on hierarchical relations, and visual framing that reinforces feudal stereotypes of *pesantren*. Conversely, field data show that authority in the *pesantren* is ethical, contextual, and pedagogical in nature, embodied through the principles of *adab*, *ta'dẓīm*, mutual respect, and dialogical learning processes, while also uncovering negative data or anomalies related to variations in disciplinary practices and differences in understanding among *santri*. The study concludes that media narratives tend to oversimplify *pesantren* traditions and fail to capture their complexity as dynamic Islamic educational institutions. The implications of these findings enrich scholarship on media representation and the culture of Islamic education, while encouraging journalists, policymakers, and *pesantren* leaders to foster more accurate, ethical, and constructive public communication about the *pesantren* world.

Keywords: Pesantren Feudalism; Media Representation; Trans7; *Adab* and *Ta'dẓīm*; Media Framing; Social Reality of *Pesantren*

Abstrak: Feodalisme pesantren sebagai isu representasi media kian mengemuka seiring meningkatnya kesenjangan antara dramatisasi pemberitaan dan realitas kehidupan keseharian komunitas pesantren, terutama di tengah disrupsi digital yang mendorong narasi sensasional melebihi akurasi faktual. Penelitian ini mengkaji representasi feodalisme pesantren dalam pemberitaan Trans7 dan membandingkannya dengan realitas sosial di Pesantren An-Nur 2 Bululawang, dengan tujuan menganalisis bagaimana citra feodal dikonstruksi dalam pemberitaan televisi serta bagaimana konstruksi tersebut berkelindan, dan kerap bertentangan dengan dinamika pendidikan, etika, dan budaya yang dijalankan di pesantren. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data diperoleh melalui analisis dokumen siaran, observasi lingkungan pesantren, serta wawancara mendalam dengan pengasuh, ustaz, dan santri, kemudian dianalisis secara interpretatif. Temuan menunjukkan tiga pola utama representasi media, yaitu dramatisasi simbolik otoritas, penonjolan selektif relasi hierarkis, dan *framing* visual yang memperkuat stereotip feodal pesantren. Sebaliknya, data lapangan memperlihatkan bahwa otoritas di pesantren bersifat etis, kontekstual, dan pedagogis, diwujudkan melalui prinsip *adab*, *ta'dẓīm*, saling menghormati, serta proses belajar yang dialogis; sekaligus mengungkap adanya data negatif atau anomali terkait variasi praktik kedisiplinan dan perbedaan pemahaman antar-santri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa narasi media cenderung menyederhanakan tradisi pesantren dan gagal menangkap kompleksitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam yang dinamis. Implikasinya, temuan studi ini memperkaya kajian representasi media dan budaya pendidikan Islam, sekaligus mendorong jurnalis, pembuat kebijakan, dan pengelola pesantren untuk membangun komunikasi publik yang lebih akurat, etis, dan konstruktif mengenai dunia pesantren.

Kata Kunci: Feodalisme Pesantren; Representasi Media; Trans7; *Adab* dan *Ta'dẓīm*; Framing Media; Realitas Sosial Pesantren

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai arena pembentukan etika, spiritualitas, dan karakter sosial santri (Putri et al., 2023). Berbeda dengan lembaga

pendidikan modern yang menekankan rasionalitas dan capaian kognitif (Natsir et al., 2024), pesantren menempatkan relasi keilmuan dalam kerangka moral dan spiritual. Sistem nilai pesantren berakar pada tiga fondasi utama, yakni adab, tawadhu', dan ta'dzim kepada kiai (Farihin & Khasani, 2023). Ketiga nilai tersebut membentuk ekosistem pendidikan yang khas, di mana hubungan antara santri dan kiai tidak didasarkan pada hierarki kekuasaan, melainkan pada ikatan spiritual dan keilmuan. Relasi tersebut merefleksikan konsep ta'dib dalam tradisi Islam klasik, yaitu integrasi antara pengetahuan, moralitas, dan tatanan sosial yang berlandaskan keadaban (Hikam & Ghifari, 2025).

Namun, sistem nilai yang bersifat simbolik dan spiritual ini sering disalahpahami ketika dibenturkan dengan paradigma modern yang menilai hubungan sosial berdasarkan logika egalitarianisme dan kebebasan individu. Dalam ruang media arus utama dan jagat digital, nilai-nilai seperti adab, tawadhu', dan ta'dzim kerap direpresentasikan secara simplistik, bahkan dilabeli sebagai praktik "feodal" yang dianggap tidak relevan dengan semangat modernitas. Fenomena ini menandai munculnya krisis representasi terhadap pesantren, ketika tradisi moral dan spiritualitas direduksi menjadi relasi dominatif dan hierarkis (Abu Bakar & Mardiyah, 2023).

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara manusia memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi informasi. Dalam ekosistem komunikasi yang ditandai oleh kecepatan, konektivitas, dan keterbukaan, informasi tidak lagi tunduk pada otoritas institusi pengetahuan tradisional, melainkan pada logika algoritma dan mekanisme viralitas (K. Hasan et al., 2023). Kondisi ini menandai lahirnya era disrupsi digital, suatu fase ketika batas antara fakta, opini, dan konstruksi sosial menjadi kabur. Meskipun media digital menghadirkan demokratisasi informasi, ia sekaligus melahirkan paradoks baru, yakni banjir informasi tanpa kedalaman pemahaman (Andriani, 2024).

Pola konsumsi informasi yang serba cepat juga mengubah logika pembentukan opini publik. Algoritma media sosial beroperasi berdasarkan tingkat keterlibatan (engagement), bukan akurasi. Akibatnya, konten yang memancing emosi lebih mudah tersebar dibandingkan narasi yang reflektif dan kontekstual (Bamasputri et al., 2025). Disrupsi digital juga menggeser sumber otoritas pengetahuan (Ridha & Irawan, 2025). Dalam tradisi pesantren, otoritas keilmuan bertumpu pada sanad dan keikhlasan pengabdian. Namun, di ruang digital, otoritas berpindah ke siapa pun yang mampu menarik perhatian publik. Terjadi fenomena epistemic flattening perataan otoritas pengetahuan yang mengaburkan batas antara ulama, jurnalis, dan warganet. Dalam konteks ini, pesantren menghadapi tantangan serius,

bagaimana menjaga otentisitas nilai adab di tengah dominasi budaya digital yang instan dan dangkal (Ridha & Irawan, 2025).

Krisis representasi nilai-nilai pesantren juga tidak terlepas dari logika ekonomi dan politik media digital (M. Z. Hasan, 2024). Platform digital menempatkan sensasionalitas di atas substansi, dan kebenaran diukur oleh viralitas. Narasi tentang "feodalisme pesantren" menjadi menarik bukan karena kebenaran empirisnya, melainkan karena daya tariknya di ruang publik. Disrupsi digital tidak hanya mengubah cara berkomunikasi, tetapi juga membentuk ulang kesadaran sosial umat. Pesantren kini menghadapi tantangan menjaga kedalaman makna di tengah arus informasi yang serba cepat, sekaligus menegaskan kembali posisi adab sebagai inti peradaban ilmu.

Namun, makna luhur ini bergeser ketika dibaca melalui paradigma media modern yang beroperasi dalam kerangka rasionalisme sekuler dan ideologi egalitarian. Relasi kiai santri diinterpretasikan melalui kategori sosial modern atas bawah, kuat lemah, guru murid dalam konteks kekuasaan. Adab yang bermakna penghormatan ditafsirkan sebagai ketundukan; tawadhu' yang berarti kerendahan hati dianggap pasif; dan ta'dzim yang merupakan ekspresi cinta ilmu dipersepsi sebagai kepatuhan buta. Pergeseran makna inilah yang melahirkan wacana "feodalisme pesantren" di ruang publik modern (Prabowo et al., 2024).

Proses framing media bekerja melalui seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas. Dalam konteks pesantren, yang disoroti bukan nilai-nilai spiritual yang mendasari praktik adab, melainkan aspek simbolik yang tampak secara visual seperti santri mencium tangan kiai atau menggunakan bahasa yang sangat sopan. Fenomena ini tidak sekadar salah tafsir, melainkan bentuk epistemic dislocation pergeseran pusat makna dari kerangka moral Islam menuju ideologi modernitas Barat (Nurrohmah, 2024). Framing media modern sering kali mengabaikan konteks pengalaman dan spiritualitas yang menjadi fondasi kehidupan pesantren. Dalam logika media yang menuntut kecepatan dan sensasionalitas, adab kehilangan kedalaman reflektifnya dan tampil sebagai citra statis. Akibatnya, pesantren menghadapi bukan hanya krisis representasi, tetapi juga krisis epistemologi, nilai-nilai transendental dipaksa tunduk pada logika pragmatis dan materialistik media (Fachrurrozi & Ami'in, 2021).

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memainkan peran fundamental dalam membentuk identitas keislaman dan kebudayaan bangsa (Ramadhani et al., 2025). Adaptasi tersebut melahirkan struktur kelembagaan khas yang

terdiri atas tiga elemen utama: kiai sebagai figur otoritas keilmuan dan moral, santri sebagai pencari ilmu sekaligus pengabdi, serta pondok sebagai ruang hidup bersama yang membentuk ikatan sosial dan spiritual (Aisyah et al., 2023). Dalam kerangka ini, kiai tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi sebagai penjaga otoritas keilmuan dan sumber barakah, sehingga aktivitas belajar menjadi perjalanan intelektual sekaligus spiritual. (Mutawakkil & Barizi, 2024).

Adab menjadi ruh pendidikan pesantren, karena ilmu diyakini hanya memberi manfaat ketika disertai ketundukan moral. Karena itu, penghormatan santri kepada kiai bukanlah bentuk feodalisme, melainkan ekspresi kesadaran spiritual bahwa menuntut ilmu menuntut keikhlasan serta disiplin etis. (Rohani, 2024). adab menjadi pilar utama epistemologi Islam yang menjaga keseimbangan antara akal, moral, dan wahyu (Marlina & Nugraha, 2025). Sikap hormat kepada guru dalam tradisi Islam bukanlah subordinasi, melainkan penghormatan terhadap ilmu sebagai pancaran kebenaran Ilahi (Jali & W, 2024).

pesantren menjadi ruang pertemuan antara tradisi dan modernitas, spiritualitas dan rasionalitas. (Hidayat et al., 2018). Hubungan kiai dan santri merupakan inti nilai pesantren. Relasi ini bukan sekadar guru dan murid, tetapi ikatan moral dan spiritual. Kiai mengajar sekaligus membimbing akhlak, sementara santri belajar ilmu sembari menempuh proses penyucian jiwa. (Maizah & Barizi, 2025). Kiai dipandang sebagai perantara dalam rantai transmisi ilmu, sehingga belajar di pesantren menjadi perjalanan spiritual yang menyatukan akal, akhlak, dan hati. (Ayatullah & Hasan, 2025). Hubungan kiai dan santri menjadi sarana pewarisan nilai dan tradisi pesantren. Alumni kemudian meneruskan tradisi itu dengan membuka pesantren baru atau mengabdi di masyarakat, sehingga terbentuk jaringan ulama yang luas. Dengan cara inilah relasi kiai–santri menjadi penopang utama ekosistem sosial dan intelektual Islam di Indonesia. (Hasanah, 2023).

Istilah feodalisme memiliki akar sejarah yang panjang dalam peradaban Eropa abad pertengahan, ketika struktur kekuasaan bertumpu pada hubungan patron-klien antara bangsawan dan rakyat (Alexanderandi & Alifian, 2024). Dalam pengertian klasik, feodalisme merujuk pada sistem hierarkis yang menempatkan individu dalam posisi ketergantungan terhadap otoritas tuan tanah atau penguasa lokal, baik dalam ranah ekonomi, politik, maupun sosial. Dalam bentuk modernnya, ia muncul sebagai paternalistik, kultus individu, dan glorifikasi figur otoritatif yang melemahkan otonomi berpikir dan rasionalitas publik. (Nur et al., 2025). Dalam masyarakat modern, "feodal" merujuk pada pola kekuasaan hierarkis yang tidak egaliter, bukan lagi pada sistem tanah. Karena itu, pelabelan "feodal" terhadap tradisi

kerap mencerminkan bias modernitas Barat yang mereduksi nilai budaya lokal menjadi simbol keterbelakangan atau irasionalitas. (Siswanto et al., 2024). Ketika otoritas tradisional dilemahkan atas nama antifeodalisme, masyarakat kehilangan figur penuntun etika yang selama ini berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan (Akhazi et al., 2025). Fenomena ini menggambarkan apa yang disebut Weber (1978) sebagai disenchantment of tradition, hilangnya kesakralan dan legitimasi sosial akibat rasionalisasi modern. Akibatnya, tradisi kehilangan makna spiritualnya karena diukur dengan standar produktivitas modern yang serba instrumental (Arifin, 2015).

Transformasi digital mengubah cara masyarakat memproduksi dan memahami informasi. Media digital bukan hanya saluran komunikasi, tetapi juga kekuatan yang membentuk ulang kesadaran dan pola pikir publik. Manuel Castells (2009) menyebutnya sebagai *network society*, tatanan sosial yang bergerak dalam jaringan global informasi, di mana kecepatan menjadi nilai utamanya (Herman, 2024). gagasan McLuhan, medium digital membentuk cara berpikir, serba instan, emosional, dan dangkal, hingga kedalaman makna semakin terpinggirkan. (Meisyaroh, 2014). Di era digital, proses ini semakin kompleks karena framing tidak hanya dilakukan media arus utama, tetapi juga oleh para pengguna di media sosial (Amanda, 2021). Dalam logika attention economy, agenda publik tidak lagi ditentukan hanya oleh redaksi, tetapi juga oleh algoritma yang mengatur apa yang terlihat dan diperbincangkan (Yaqin M.S, 2023).

Kombinasi framing, narasi, dan algoritma membentuk ekologi representasi baru di era digital. Publik kini lebih sering berhadapan dengan realitas yang dikonstruksi media, sehingga batas fakta dan fiksi makin kabur. Karena itu, analisis konstruksi realitas media tidak hanya soal komunikasi, tetapi juga menyangkut persoalan pengetahuan dan etika: media ikut menentukan apa yang dianggap benar, penting, dan layak dibahas. (Permadi et al., 2024). Dalam konteks agama dan tradisi, diperlukan wacana yang lebih beradab dan berakar pada nilai spiritual, bukan mengikuti arus viralitas yang menyesatkan makna. Pada dasarnya, media digital tidak hanya merekam realitas, tetapi ikut menciptakannya. Karena itu, memahami cara framing, narasi, dan agenda setting bekerja menjadi kunci untuk membaca ulang bagaimana lembaga keagamaan, tradisi, dan figur otoritatif dibentuk serta dimaknai di era disrupsi digital.

Implikasinya bersifat sosial dan kultural. Ketika adab dipersepsi sebagai simbol feodalisme, pesantren kehilangan posisi moralnya sebagai penjaga nilai keilmuan Islam yang beradab. Relasi spiritual antara santri dan kiai dipahami sebagai relasi kekuasaan yang opresif,

sementara generasi muda santri menghadapi tekanan untuk menafsirkan kembali makna adab di tengah narasi global tentang kebebasan dan kesetaraan. Oleh karena itu, upaya dekonstruksi wacana media menjadi penting untuk membaca ulang relasi makna antara adab dan "feodalisme", antara spiritualitas dan modernitas, serta antara pesantren dan ruang publik digital secara lebih kritis dan kontekstual.

Fenomena kemunculan wacana "feodalisme pesantren" di ruang publik digital menunjukkan adanya ketegangan epistemologis antara logika pemberitaan media arus utama dan sistem nilai pesantren yang berakar pada adab, tawadhu', serta ta'dzim. Ketidaksepadanan kerangka makna ini memunculkan krisis representasi, di mana nilai-nilai spiritual dan etis pesantren direduksi menjadi tanda ketundukan feodal. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan pokok: bagaimana media membangun dan merepresentasikan wacana "feodalisme pesantren"; bagaimana konsep adab santri mengalami distorsi dalam pemberitaan; dan bagaimana pendekatan dekonstruktif dapat digunakan untuk membuka bias makna tersebut. Tujuan penelitian ini bukan sekadar membantah narasi media, tetapi menganalisis secara kritis proses produksi wacana yang membingkai relasi kiai–santri, mengidentifikasi reduksi makna adab dalam logika modernitas, serta menawarkan pembacaan alternatif melalui strategi dekonstruksi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memulihkan pemahaman adab sebagai etika epistemologis dalam pendidikan Islam serta menegaskan pesantren sebagai ruang pengetahuan yang dinamis, bukan entitas tradisional yang diposisikan berlawanan dengan modernitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menelaah konstruksi representasi feodalisme pesantren dalam pemberitaan Trans7 serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan realitas sosial di Pesantren An-Nur 2 Bululawang Malang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menjelaskan fenomena secara mendalam, terutama terkait produksi makna, relasi kuasa, dan praktik representasi yang tidak dapat dijangkau melalui metode kuantitatif. Penenlitian ini dilakukan mulai awal bulan November hingga akhir November.

Secara metodologis, penelitian ini menggabungkan analisis wacana kritis (AWK) Teun A. van Dijk dan etnografi mini pesantren. Analisis wacana kritis digunakan untuk membongkar struktur teks, praktik kognitif jurnalis, dan konteks sosial-ideologis yang

melatarbelakangi penyusunan berita mengenai feodalisme pesantren di Trans7. Pendekatan van Dijk dipilih karena kerangka ini menempatkan bahasa sebagai arena pertarungan makna dan kekuasaan, sehingga relevan untuk mengurai konstruksi feodalisme yang sering kali diproduksi melalui labelisasi dan simplifikasi terhadap tradisi pesantren.

Sementara itu, penggunaan etnografi mini dimaksudkan untuk menghadirkan deskripsi kontekstual mengenai kehidupan sosial di Pesantren An-Nur 2 Bululawang. Melalui observasi partisipatif terbatas dan wawancara mendalam dengan kiai, ustaz/ustazah, pengurus, dan santri, peneliti mengumpulkan data mengenai pola relasi, praktik adab, struktur otoritas keilmuan, serta dinamika keseharian yang sering kali tidak tampak dalam representasi media. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada teks media, tetapi juga menguji sejauh mana wacana media bersinggungan, menyimpang, atau bertentangan dengan realitas sosial pesantren.

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama: (1) dokumentasi, berupa arsip pemberitaan Trans7, transkrip audio-visual, teks narasi, dan elemen visual yang relevan; (2) observasi, untuk memetakan praktik keseharian, hubungan kiai-santri, dan bentuk-bentuk interaksi yang sering kali direduksi oleh media; serta (3) wawancara mendalam ketua bagian kurikulum, salah satu Ustadz pengajar dan salah satu santri, guna menangkap perspektif aktor pesantren dan memahami struktur makna yang mereka bangun mengenai otoritas keilmuan dan adab.

Analisis data dilakukan melalui tahapan: reduksi data, kategorisasi, pembacaan kritis terhadap teks media, pemetaan konteks sosial, dan interpretasi holistik melalui triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi digunakan untuk menjamin ketepatan interpretasi dan memperkuat validitas temuan, terutama dalam membandingkan konstruksi media dengan pengalaman sosial para aktor pesantren.

Dengan kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan representasi feodalisme pesantren dalam media televisi, tetapi juga menempatkannya dalam horizon kultural pesantren, sehingga menghasilkan pembacaan yang lebih proporsional, kritis, dan epistemik-reflektif.

HASIL

Polemik mengenai "feodalisme pesantren" yang dipicu oleh tayangan Xpose Uncensored Trans7 pada 13 Oktober 2025, menghasilkan gelombang reaksi luas dari masyarakat, khususnya dari kalangan pesantren. Tayangan tersebut menampilkan adegan santri merunduk, mencium tangan kiai, dan potongan-potongan visual lain yang dikemas sebagai bukti adanya relasi feodal. Framing semacam ini segera mendapat bantahan dari berbagai pihak. FKPP Kudus, misalnya, menegaskan bahwa santri bukan simbol feodalisme dan bahwa relasi guru dan murid dalam pesantren berdiri di atas kesetaraan spiritual, adab, dan keikhlasan. Narasi bahwa sikap hormat adalah bentuk penindasan juga dibantah dalam sejumlah artikel opini; salah satunya menegaskan bahwa tradisi seperti mencium tangan atau berjalan merendah bukanlah relasi kuasa, tetapi ekspresi ta'dzim yang menjadi bagian tak terpisahkan dari etika pencarian ilmu (Muria News. 2025). Meskipun demikian, terdapat pula suara yang melihat kritik Trans7 sebagai peluang refleksi. Guru Gembul, pada Jumat, 17 Oktober 2025 misalnya, menyatakan bahwa kritik terhadap praktik feodalisme adalah wajar selama relevan, dan bahwa pihak yang tidak merasa melakukan hal tersebut seharusnya tidak tersinggung. Munculnya variasi respons ini memperlihatkan bahwa polemik feodalisme bukan hanya soal benar atau salah, tetapi soal bagaimana makna budaya diproduksi dan dinegosiasikan di ruang publik (Kilat.Com. 2025).

Pembahasan atas temuan tersebut menunjukkan bahwa istilah feodalisme yang disematkan kepada pesantren lebih merupakan konstruksi media daripada representasi yang akurat atas realitas sosial pesantren. Tayangan Trans7 mengadopsi perspektif modern yang cenderung menilai tradisi melalui kategori sekuler seperti kesetaraan formal dan relasi kuasa, sehingga tradisi adab terbaca sebagai hierarki feodal. Dalam kerangka ini, media tampak gagal menangkap dimensi epistemik dan spiritual dari hubungan kiai dan santri. Penolakan keras dari tokoh seperti Iwan Januar Sabtu, 18 Oktober 2025, yang menyebut framing tersebut "menyakitkan", serta kritik lain yang menyebut tayangan Trans7 sebagai "kejahatan pikiran", memperlihatkan adanya kegelisahan kolektif bahwa pesantren sedang direduksi menjadi institusi feodal (TintaSiyasi.id. 2025). Reaksi publik berupa merebaknya tagar #BoikotTrans7 semakin menunjukkan bahwa masyarakat berusaha merebut kembali makna tradisi pesantren dari narasi media yang dianggap tidak adil. Pada saat yang sama, suara-suara kritis yang lebih moderat menunjukkan bahwa polemik ini dapat menjadi ruang refleksi untuk menilai apakah ada praktik internal yang perlu diperbaiki tanpa harus melepaskan nilai luhur tradisi.

Representasi feodalisme pesantren dalam pemberitaan Trans7 tampak terbangun melalui narasi yang cenderung menekankan hierarki otoritas antara kiai, ustaz, dan santri. Narasi utama yang dihadirkan berita lebih banyak menyoroti relasi kuasa yang timpang sebagai formula dramatik, sehingga pesantren diposisikan sebagai ruang sosial yang sarat kepatuhan absolut dan struktur kepemimpinan yang tidak dapat diganggu gugat. Narasi ini diperkuat oleh pemilihan diksi yang bernuansa konfrontatif, seperti "pengaruh besar kiai," "ketaatan mutlak," atau "tradisi yang tak boleh dibantah", yang secara implisit membingkai pesantren sebagai institusi konservatif dengan pola relasi feodal.

Secara visual, Trans7 menggunakan angle pengambilan gambar yang kerap menonjolkan figur kiai sebagai pusat perhatian, misalnya dengan close-up pada ekspresi otoritatif, low angle shot untuk mempertegas posisi kuasa, serta wide shot yang memperlihatkan barisan santri dalam formasi rapi layaknya representasi ketaatan seremonial. Kombinasi visual dan diksi tersebut membentuk konstruksi pesan yang memposisikan santri sebagai subjek pasif, sementara otoritas pesantren tampil sebagai pusat komando yang tidak terbantahkan. Penggunaan tone warna dan ritme editing yang cenderung serius—ditambah musik latar bernuansa ketegangan, ikut memperkuat kesan rigiditas struktur sosial pesantren.

Tema feodalisme yang teridentifikasi dalam pemberitaan tampak melalui tiga pola utama. Pertama, otoritarianisme, yang dimunculkan melalui penggambaran kiai sebagai figur tunggal dengan kewenangan absolut. Kedua, ketaatan buta, yang dihadirkan lewat narasi bahwa santri hanya mengikuti aturan tanpa refleksi kritis. Ketiga, kekerasan simbolik, yang tersirat melalui penonjolan tradisi disiplin ketat, penggunaan istilah "hukuman," atau ritual-ritual yang digambarkan sebagai bentuk penundukan diri. Penyusunan tema tersebut tidak semata-mata muncul dari data empirik, tetapi merupakan hasil reduksi realitas yang dikonstruksi media melalui pilihan potongan peristiwa yang dianggap dramatis dan layak jual.

Melalui analisis framing, penelitian ini menemukan bahwa Trans7 menerapkan pola konstruksi yang sejalan dengan logika pemberitaan televisi: simplifikasi isu, pencarian elemen emosional, dan penekanan pada konflik simbolik. Frame utama yang dibangun adalah bahwa pesantren merupakan lembaga tradisional yang masih dilingkupi relasi sosial feodal, sehingga memunculkan dikotomi modern - tradisional dan rasional - otoritarian. Dengan teknik seleksi informasi, penonjolan aspek tertentu, serta pengulangan simbol kuasa kiai, Trans7 secara tidak langsung membentuk persepsi publik bahwa hubungan di pesantren didominasi pola patron–klien yang bersifat hierarkis. Temuan ini menunjukkan bahwa representasi

feodalisme pesantren di televisi bukanlah cerminan realitas secara utuh, melainkan hasil konstruksi media yang memilih sebagian aspek kehidupan pesantren sesuai kebutuhan naratif dan kepentingan dramatisasi.

Hal ini turut menuai respon dari Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Bululawang-Malang. Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara denagn pengasuh Pondok pesantren Wisata An Nur 2 menunjukkan adanya jarak yang jelas antara representasi feodalisme pesantren dalam pemberitaan Trans7 dan realitas sosial yang ditemukan di Pesantren An-Nur 2 Bululawang. Analisis media memperlihatkan bahwa Trans7 membangun narasi yang menonjolkan ketimpangan relasi kuasa antara kiai dan santri melalui pemilihan diksi yang konfrontatif, visual yang dramatis, serta angle pengambilan gambar yang menegaskan superioritas figur kiai. Dalam pemberitaan tersebut, pesantren digambarkan sebagai ruang sosial yang rigid, tertutup, dan dipenuhi ketaatan mutlak. Narasi seperti "pengaruh absolut kiai", "ketaatan tanpa syarat", atau adegan barisan santri yang ditampilkan melalui wide shot, serta low angle pada figur kiai, memperkuat kesan bahwa pesantren adalah institusi dengan struktur feodal yang bekerja secara sepihak tanpa ruang dialog.

Namun, temuan lapangan hasil wawancara mendalam dengan pimpinan Pesantren Wisata An-Nur 2 memberikan gambaran yang sangat berbeda. "*Tradisi pesantren justru dibangun di atas ṭarīqah ta'līm wa ta'allum serta ta'dīb wa ta'adub, yakni praktik pendidikan yang menempatkan adab dan keteladanan sebagai fondasi utama. Penghormatan santri kepada kiai tidak lahir dari relasi kekuasaan, tetapi dari kesadaran spiritual dan keilmuan bahwa kiai adalah figur yang membimbing mereka menuju ilmu dan keberkahan"* (Ustadz Husain. 2025). Pimpinan pesantren menegaskan bahwa "*relasi kiai dan santri bersifat saling melengkapi: kiai menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengajar, sementara santri menunjukkan penghormatan melalui kesungguhan belajar dan khidmah dalam batas kewajaran*". Dengan demikian, apa yang dipersepsikan media sebagai kepatuhan buta sesungguhnya merupakan etika belajar yang bersumber dari tradisi pendidikan Islam klasik.

Realitas struktural di pesantren juga tidak sejalan dengan konstruksi media. Jika Trans7 menampilkan pesantren sebagai lembaga otoriter yang dikendalikan sepenuhnya oleh satu figur, Ustadz Husain mengungkap bahwa "*Kepemimpinan di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Bululawang-Malang berjalan secara fungsional melalui struktur berjenjang: Dewan Pengasuh sebagai otoritas tertinggi, Ma'hadiyah sebagai koordinator harian, serta unit-unit lembaga yang memiliki tanggung jawab jelas. Proses pengambilan keputusan tidak bersifat sepihak, tetapi melalui mekanisme musyawarah*

di tingkat lembaga sebelum diajukan kepada kiai. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syūrā tetap hidup dalam tata kelola pesantren, sehingga tidak relevan dengan gambaran otoritarianisme yang ditangkap media".

Selain itu, tema kekerasan simbolik yang diangkat Trans7, misalnya posisi duduk santri yang lebih rendah atau pola disiplin tertentu, tidak mencerminkan realitas sosial di pesantren. Pimpinan pesantren menjelaskan bahwa "*kedisiplinan di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Bululawang-Malang berorientasi pada optimalisasi proses belajar-mengajar, terutama ketepatan waktu sebagai bagian dari adab menuntut ilmu. Tidak pernah ditemukan penyalahgunaan otoritas karena seluruh aktivitas kepesantrenan berpusat pada mulāzamah keilmuan, yakni keterikatan intensif antara kiai, ustaz, dan santri dalam kegiatan belajar harian. Tradisi ini membatasi potensi lahirnya praktik sewenang-wenang, sehingga relasi kuasa berjalan secara proporsional dan terarah.*

Lebih jauh, wawancara mengungkap bahwa persepsi feodalisme yang berkembang di publik sering kali bukan berasal dari pesantren tradisional, melainkan dari lembaga pseudo-pesantren yang tidak menjalankan tradisi kitab kuning, tidak memiliki kurikulum keilmuan yang jelas, atau memperlakukan santri sebagai tenaga kerja. Fenomena inilah yang kemudian disamaratakan oleh media sehingga pesantren yang menjalankan fungsi pendidikan secara benar turut terkena imbas framing negatif. Pimpinan pesantren menyatakan bahwa pemberitaan Trans7 tidak mencerminkan kondisi pesantren yang sesungguhnya dan terkesan didorong oleh kepentingan sensasional alih-alih validasi fakta. Ia menegaskan bahwa kualitas sebuah bangsa sangat ditentukan oleh integritas medianya; jika media mengejar viralitas tanpa verifikasi, maka publik akan menerima informasi yang bias dan berpotensi mengalami kerusakan sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa representasi feodalisme pesantren dalam pemberitaan Trans7 merupakan hasil konstruksi media yang tidak mempertimbangkan konteks budaya dan tradisi pendidikan pesantren. Sementara itu, temuan lapangan memperlihatkan bahwa kehidupan Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Bululawang-Malang berjalan pada kerangka keilmuan, adab, dan musyawarah yang tidak merefleksikan pola feodal sebagaimana diberitakan. Dengan menempatkan kedua temuan ini secara berdampingan, penelitian ini menegaskan adanya ketegangan antara konstruksi media dan realitas sosial pesantren yang lebih kompleks, dinamis, dan berakar pada tradisi keilmuan Islam.



Gambar 1. Pemberitaan Xpose Uncensored di Trans7 tentang isu feodalisme pesantren

Gambar 1 menunjukkan bagaimana Xpose Uncensored Trans7 membingkai isu feodalisme pesantren dengan nada dramatik. Visual tersebut penting karena menggambarkan awal munculnya persepsi publik yang cenderung menyederhanakan realitas pesantren. Melalui gambar ini tampak bahwa pemberitaan media sering menonjolkan sisi kontroversial, sehingga memunculkan jarak antara apa yang ditampilkan di layar dan kehidupan nyata pesantren yang sehari-hari dijalani santri dan kiai. Gambar ini menjadi penanda bahwa narasi media perlu diuji kembali melalui data lapangan agar penilaian publik lebih proporsional. Representasi Feodalisme Pesantren dalam Pemberitaan Trans7 dapat kita lihat dari tabel berikut :

Tabel 1. Representasi Feodalisme Pesantren dalam Pemberitaan Trans7

NO	Komponen Analisis	Komponen Analisis
1	Narasi Utama	•Menekankan relasi kuasa kiai–santri. •Menampilkan pesantren sebagai institusi dengan struktur kepatuhan hierarkis. •Menggunakan narasi dramatik seperti “ketaatan mutlak”, “otoritas kiai tidak terbantahkan”.
2	Visual dan Angle Pemberitaan	•Low angle shot pada kiai untuk menegaskan posisi otoritas. •Close-up ekspresi kiai menonjolkan figur sentral. •Wide shot barisan santri menggambarkan ketaatan kolektif. •Tone warna serius, musik latar tegang, ritme editing cepat.
3	Diksi dan Bahasa	•Pemilihan istilah bernada konfrontatif: “disiplin ketat”, “pengaruh besar kiai”, “aturan yang harus dipatuhi”. •Diksi membingkai pesantren sebagai ruang yang rigid dan tradisional.

NO	Komponen Analisis	Komponen Analisis
4	Tema Feodalisme	•Otoritarianisme: penggambaran kiai sebagai pemegang kuasa absolut. •Ketaatan Buta: santri diposisikan sebagai subjek pasif tanpa refleksi kritis. •Kekerasan Simbolik: penonjolan "hukuman", ritual disiplin, dan gestur ketundukan.
5	Framing Media	•Pola dramatik televisi: simplifikasi, emosionalisasi, dan penonjolan konflik simbolik. •Seleksi potongan peristiwa yang memperkuat struktur hierarki. •Kontras "tradisional vs modern" sebagai frame utama. •Penyajian hanya sebagian realitas sesuai kebutuhan dramatik.

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa representasi feodalisme pesantren dalam pemberitaan Trans7 tidak berdiri secara alamiah, melainkan dibentuk melalui kombinasi narasi, visual, dan pemilihan diksi yang secara konsisten menonjolkan relasi kuasa hierarkis. Pola visual seperti low angle shot terhadap kiai dan wide shot barisan santri, dipadukan dengan istilah bernada otoritatif, menghasilkan konstruksi makna bahwa pesantren adalah ruang sosial dengan kepatuhan mutlak. Identifikasi tema feodalisme, mulai dari otoritarianisme hingga kekerasan simbolik, muncul bukan sebagai refleksi keseluruhan realitas pesantren, tetapi sebagai hasil seleksi informasi yang menonjolkan aspek dramatik. Temuan ini menegaskan bahwa framing Trans7 bergerak dalam logika penyederhanaan isu dan pencarian ketegangan simbolik, sehingga realitas pesantren direduksi menjadi gambaran relasi patron–klien yang bersifat statis dan tak ternegosiasi. Dengan demikian, tabel tersebut mengonfirmasi bahwa konstruksi media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik mengenai feodalisme pesantren.

Tabel 2. Perbandingan Representasi Media dan Realitas Sosial Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Bululawang-Malang

NO	Aspek	Representasi Media (Trans7)	Realitas Sosial Pesantren An-Nur 2 (Berdasarkan Wawancara)
1	Relasi Kiai–Santri	Ditampilkan sebagai relasi hierarkis dengan nuansa dominasi, seolah santri hanya tunduk secara pasif sehingga tampak seperti pola feodalisme.	Relasi berbasis ta'dzim, adab, dan keteladanan. Pengasuh berperan sebagai guru sekaligus figur orang tua. Santri belajar, bukan tunduk secara buta. Tidak ditemukan praktik eksploitasi atau relasi kekuasaan yang menyimpang.

NO	Aspek	Representasi Media (Trans7)	Realitas Sosial Pesantren An-Nur 2 (Berdasarkan Wawancara)
2	Bentuk Penghormatan kepada Kiai	Diinterpretasikan sebagai bentuk pengkultusan, ketaatan berlebihan, dan indikasi struktur feodal.	Penghormatan dipahami sebagai tradisi ta'dzim yang berorientasi spiritual—membersihkan hati, menghindari kesombongan, dan menumbuhkan keberkahan ilmu. Dilakukan dalam batas wajar, tidak berlebihan, dan tidak memaksa.
3	Kedisiplinan dan Aturan	Dipersepsikan sebagai aturan keras dan mengekang, mendukung gambaran feodalisme.	Kedisiplinan berfokus pada ta'līm–ta'allum (belajar dan mengajar). Hukuman bersifat edukatif, tidak represif. Santri mengakui bahwa disiplin membantu membentuk karakter dan ketertiban. Tidak ada aturan yang memaksa di luar kepentingan pendidikan.
4	Struktur Kekuasaan	Digambarkan sebagai struktur yang sangat hierarkis, terpusat, dan rentan penyalahgunaan otoritas.	Struktur berjenjang namun fungsional: Kiai → Ma'hadiyah → Lembaga → Pengurus → Santri. Keputusan diambil melalui musyawarah, diajukan ke kiai, dan dipertimbangkan secara matang. Evaluasi dilakukan jika ada penyimpangan pengurus.
5	Peran Pengurus	Digambarkan sebagai aktor yang mungkin menekan atau mengatur santri secara otoriter.	Pengurus berperan sebagai pendamping dengan welas asih, menjaga aktivitas santri, dan memberikan teguran edukatif. Tidak semua pengurus memiliki kewenangan sanksi. Kasus ketidakadilan ditangani melalui pembinaan dan evaluasi Ma'hadiyah.
6	Kegiatan Sehari-hari Santri	Media menonjolkan gambaran santri sebagai pihak yang bekerja melayani kiai, memunculkan kesan feodal.	Santri menyatakan hubungan dengan ustaz dan kiai sangat baik. Membantu kiai dilakukan dengan sukarela sebagai bentuk bakti, bukan perintah memaksa. Santri merasa bebas menyampaikan pendapat dengan adab.
7	Konsep Ta'dzim dan Adab	Diinterpretasikan sebagai simbol kepatuhan absolut dan ketertundukan hierarkis.	Ta'dzim dipahami sebagai bagian dari pendidikan spiritual, pengendalian diri, dan akhlak. Guru menjelaskan bahwa ta'dzim tidak boleh berlebihan dan tetap berada dalam koridor syar'i.
8	Pemberian Sanksi	Sanksi disorot sebagai tindakan keras dan berpotensi eksploitatif.	Sanksi ringan diberikan untuk edukasi, sementara pelanggaran berat diproses melalui pengurus tertentu. Tidak ada kasus penyalahgunaan yang dilaporkan. Pengurus dievaluasi bila bertindak tidak proporsional.

NO	Aspek	Representasi Media (Trans7)	Realitas Sosial Pesantren An-Nur 2 (Berdasarkan Wawancara)
9	Citra Pesantren	Media membangun citra pesantren sebagai lembaga tradisional yang feodal dan tidak modern.	Wawancara menunjukkan pesantren modern, terstruktur, berorientasi pendidikan, dan berpegang pada tradisi keilmuan. Pihak pesantren menilai pemberitaan tidak objektif dan tidak sesuai realitas keseharian.
10	Respons Terhadap Pemberitaan	Media menampilkan pesantren sebagai lembaga bermasalah secara sosial.	Pesantren menilai pemberitaan tidak tepat, menyesatkan publik, dan tidak melalui validasi lapangan. Warga pesantren tetap tenang, melakukan muhasabah, dan menegaskan pentingnya edukasi literasi media.

Tabel 2 ini memperlihatkan kontras antara konstruksi media dan realitas sosial pesantren. Trans7 membingkai pesantren dalam narasi feodalisme melalui visual dramatis, diksi konfrontatif, dan seleksi fakta yang menonjolkan ketimpangan hierarki. Sebaliknya, wawancara di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Bululawang-Malang menunjukkan bahwa hubungan kiai–santri berlangsung dalam kerangka adab, keilmuan, dan musyawarah, sehingga tidak mencerminkan pola feodal sebagaimana diberitakan. Perbandingan ini menegaskan bahwa representasi media lebih merupakan konstruksi naratif daripada cerminan empiris kehidupan pesantren.

Meskipun temuan utama penelitian menunjukkan bahwa representasi feodalisme pesantren dalam pemberitaan Trans7 tidak selaras dengan realitas sosial Pesantren An-Nur 2, sejumlah data negatif atau temuan anomali tetap muncul selama proses penggalian data. Temuan-temuan ini tidak menunjukkan keberadaan praktik feodal di pesantren, tetapi berfungsi sebagai indikator dinamika internal yang memiliki potensi menimbulkan salah tafsir ketika dipandang dari luar tradisi pesantren. Dalam perspektif metodologi kualitatif, data negatif ini penting karena menegaskan bahwa realitas sosial di pesantren tidak bersifat homogen, melainkan mengandung nuansa, ketegangan makna, dan kompleksitas yang perlu dipertimbangkan dalam analisis akhir.

Anomali pertama terlihat pada pengalaman sebagian santri yang menyatakan bahwa beberapa bentuk adab, seperti menjaga gestur tubuh, menundukkan pandangan di hadapan kiai, atau mengikuti ritme kegiatan tanpa banyak bertanya, terasa berat pada tahap awal masa mondok. Santri menyadari bahwa praktik tersebut merupakan bagian dari pendidikan akhlak, namun bagi individu yang belum memahami tradisi pesantren, pola ini dapat dipersepsikan

sebagai bentuk kepatuhan berlebihan. Walaupun tidak berdampak negatif secara internal, penerapan adab secara ketat ini menghadirkan celah interpretatif yang dapat dibaca sebagai feodalisme oleh masyarakat luar yang tidak memahami konteks budaya pesantren.

Anomali kedua muncul dari wawancara dengan beberapa staf kepengurusan yang mengakui bahwa pemahaman santri terhadap konsep ta'dzim tidak selalu sejalan dengan makna filosofisnya. Dalam beberapa kasus, santri menjalankan adab secara mekanis, lebih pada level kepatuhan normatif daripada kesadaran etis. Kondisi ini tidak menggambarkan dominasi kiai, tetapi menunjukkan terjadinya reduksi makna adab pada level praktik. Ketika praktik adab dilakukan tanpa pemaknaan mendalam, ia rentan dibaca sebagai bentuk subordinasi oleh pengamat luar. Temuan ini memperlihatkan adanya ruang edukasi internal yang perlu diperkuat, agar adab tidak hanya menjadi ritual sosial, tetapi juga praktik reflektif yang berakar pada kesadaran spiritual.

Anomali ketiga berkaitan dengan pola pengambilan keputusan. Meskipun pesantren menegaskan bahwa musyawarah merupakan mekanisme utama, beberapa informan menyatakan bahwa intensitas pelibatan mereka dalam proses tersebut sangat bergantung pada konteks. Dalam situasi tertentu, keputusan strategis tetap menunggu arahan final dari kiai. Pola ini tidak dianggap sebagai otoritarianisme oleh internal pesantren, karena budaya pesantren memang memosisikan kiai sebagai figur keilmuan tertinggi. Namun, dari perspektif administrasi modern, pola sentralisasi keputusan seperti ini dapat terbaca sebagai struktur vertikal yang kuat, sehingga membuka ruang interpretasi feodal ketika dianalisis tanpa mempertimbangkan kerangka tradisi pesantren.

Anomali keempat terlihat pada aspek kedisiplinan. Beberapa santri mengakui bahwa disiplin waktu yang ketat pada awalnya menimbulkan rasa terbebani. Intensitas kegiatan mengaji, sekolah, dan mulāzamah menjadikan ritme harian santri padat dan menuntut adaptasi yang signifikan. Meskipun setelah beradaptasi santri memahami tujuan disiplin tersebut, fase awal yang berat dapat terbaca sebagai tekanan bagi pihak luar yang tidak mengenal ritme pendidikan pesantren. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan disiplin ketat perlu terus disertai penguatan pendampingan dan pemahaman makna agar santri melalui proses adaptasi secara lebih ringan.

Anomali terakhir berhubungan dengan absennya mekanisme evaluasi formal terhadap relasi kuasa di pesantren. Pengasuh menilai bahwa karena tidak ditemukan praktik penyalahgunaan wewenang, evaluasi khusus dianggap tidak diperlukan. Namun, dalam

perspektif ilmiah, ketiadaan prosedur evaluasi formal berpotensi menjadi titik rentan, terutama jika di kemudian hari muncul peristiwa atau persepsi negatif yang membutuhkan penanganan struktural. Absennya mekanisme ini bukan bukti adanya pelanggaran, tetapi menunjukkan adanya ruang penguatan kelembagaan untuk memastikan bahwa relasi kiai–santri selalu berada dalam koridor syar'i dan etis.

Data negatif ini menegaskan bahwa meskipun Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Bululawang-Malang tidak menunjukkan pola relasi feodal sebagaimana digambarkan dalam pemberitaan Trans7, realitas sosial pesantren tetap mengandung dinamika yang kompleks dan tidak sepenuhnya bebas dari potensi salah tafsir. Temuan anomali ini sekaligus memperkuat argumen bahwa representasi media tidak hanya bergantung pada fakta empiris, tetapi juga pada bagaimana fakta tersebut dipersepsikan, dipilah, dan ditafsirkan oleh aktor dari luar tradisi pesantren. Dengan demikian, kehadiran data negatif memberikan kedalaman analitis yang memperkaya pemahaman terhadap relasi kiai dan santri serta memperlihatkan bahwa realitas pesantren tidak dapat direduksi menjadi narasi tunggal, baik yang sangat ideal maupun yang sangat problematis.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya ketegangan signifikan antara representasi feodalisme pesantren dalam pemberitaan Trans7 dan realitas sosial Pesantren An-Nur 2 Bululawang. Analisis data menunjukkan bahwa konstruksi media lebih menekankan narasi dramatik yang mengedepankan hierarki kuasa, sementara realitas lapangan menampilkan dinamika hubungan kiai–santri yang berlandaskan pada adab, keteladanan, dan tradisi keilmuan pesantren. Kontras ini mengindikasikan bahwa representasi media bukan sekadar refleksi realitas, tetapi merupakan hasil proses seleksi, penonjolan, dan framing yang dilakukan media sesuai kepentingan dramatik, estetika visual, dan logika pemberitaan televisi.

Analisis hasil memperlihatkan bahwa Trans7 membangun representasi feodalisme melalui tiga strategi utama: pemilihan diksi yang konfrontatif, visualisasi hierarkis yang menekankan superioritas kiai, serta framing yang menyederhanakan dinamika pesantren menjadi relasi patron, klien. Tema feodalisme, seperti otoritarianisme, ketaatan buta, dan kekerasan simbolik, ditonjolkan tanpa memberikan konteks mengenai tradisi ta'dīb dan ta'līm yang melatarbelakangi praktik adab di lingkungan pesantren.

Sebaliknya, hasil wawancara menunjukkan bahwa Pesantren An-Nur 2 memiliki mekanisme relasi yang jauh lebih kompleks. Adab kepada kiai dipahami sebagai bentuk penghormatan epistemologis, bukan sebagai penundukan sosial. Struktur kepemimpinan pesantren berjalan secara fungsional dengan mekanisme musyawarah internal, dan kedisiplinan diterapkan sebagai bagian integral dari etika menuntut ilmu. Tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan otoritas, dan tradisi mulāzamah menjadi instrumen pengawasan moral yang efektif.

Ketegangan antara konstruksi media dan realitas lapangan ini memperlihatkan bahwa representasi feodalisme dalam pemberitaan bukan merupakan refleksi langsung kondisi pesantren, melainkan hasil penyederhanaan simbolik yang tidak mempertimbangkan konteks budaya dan epistemik pesantren.

Temuan tersebut menjadi semakin signifikan ketika dibaca dalam kerangka teori representasi Stuart Hall yang menyatakan bahwa media tidak hanya "mencerminkan" realitas, tetapi memproduksi makna melalui proses encoding yang dipengaruhi oleh ideologi dan struktur produksi. Representasi feodal dalam pemberitaan Trans7 dapat dibaca sebagai hasil proses encoding yang berangkat dari nilai-nilai modernitas, misalnya: transparansi, egalitarianisme, dan rasionalitas, yang kemudian digunakan sebagai lensa membaca tradisi pesantren.

Dalam konteks media dan agama, sejumlah penelitian menjelaskan bahwa simbol-simbol adab dalam pesantren sering disalahartikan sebagai dominasi karena kerangka modern tidak selalu kompatibel dengan kerangka tradisional. Literatur antropologi pendidikan Islam juga menunjukkan bahwa tradisi ta'dzim, duduk lebih rendah dari guru, atau praktik khidmah bukan bentuk subordinasi, melainkan bagian dari praktik pembelajaran berbasis akhlak yang telah berlangsung berabad-abad.

Di sisi lain, penelitian tentang efek media menunjukkan bahwa televisi memiliki kecenderungan memusatkan perhatian pada elemen yang bersifat dramatik untuk menarik minat penonton. Hal ini menjelaskan mengapa Trans7 lebih memilih potongan visual yang menonjolkan ketegangan hierarkis daripada kegiatan ilmiah seperti sorogan, wetonan, atau dialog keilmuan yang lebih mencerminkan esensi pesantren.

Temuan penelitian ini berada dalam garis yang konsisten dengan literatur: media cenderung membingkai realitas kompleks menjadi narasi tunggal yang mudah dicerna, sementara pesantren bekerja dalam epistemologi berbeda yang sulit dipahami tanpa literasi budaya.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting, baik bagi media, pesantren, maupun masyarakat. Pertama, bagi media, temuan ini menegaskan perlunya sensitivitas budaya dan pemahaman konteks ketika meliput lembaga pendidikan tradisional. Representasi yang tidak akurat bukan hanya menciptakan kesalahpahaman publik, tetapi juga berpotensi melahirkan stigma yang merugikan pesantren sebagai institusi pendidikan.

Kedua, bagi pesantren, penelitian ini menyoroti pentingnya memperkuat komunikasi publik untuk menjembatani kesenjangan interpretasi antara dunia pesantren dan masyarakat luar. Pesantren perlu membangun strategi literasi media agar simbol-simbol adab tidak terus-menerus dibaca secara negatif. Ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap tradisi pesantren tidak dapat dilakukan melalui kacamata modern semata. Masyarakat perlu memahami bahwa praktik adab dalam pesantren berakar pada epistemologi keilmuan yang berbeda, sehingga tidak tepat disamakan dengan praktik feodalisme dalam politik atau sejarah sosial. Secara akademik, temuan ini menggarisbawahi peran media sebagai agen konstruksi sosial yang kuat, sekaligus menegaskan pentingnya penelitian kontekstual untuk menyeimbangi representasi media yang sering kali reduktif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, analisis media berfokus pada satu sumber pemberitaan, yakni Trans7. Hal ini memungkinkan adanya bias karena representasi pesantren di media lain mungkin memperlihatkan pola yang berbeda. Kedua, data lapangan diperoleh dari satu pesantren, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pesantren di Indonesia yang memiliki karakteristik dan tradisi masing-masing. Ketiga, penelitian ini bergantung pada narasi informan, sehingga terdapat kemungkinan bias subjektif baik dari pihak pengasuh, pengurus, maupun santri. Keempat, dinamika relasi kuasa dalam pesantren bersifat kultural dan laten, sehingga beberapa aspek mungkin tidak muncul dalam wawancara dan memerlukan observasi jangka panjang untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik.

Dengan demikian, studi lanjutan yang melibatkan multi-platform media dan variasi kultur pesantren menjadi krusial untuk memperluas horizon pemahaman mengenai relasi media dan tradisi Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi feodalisme pesantren dalam pemberitaan Trans7 tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial di Pesantren An-Nur 2

Bululawang. Media cenderung menonjolkan narasi dramatik dan hierarkis yang mengesankan dominasi *kiai*, relasi kuasa yang kaku, serta struktur sosial yang feodal, sementara temuan lapangan justru memperlihatkan dinamika kehidupan pesantren yang lebih kompleks dan berlandaskan prinsip *adab*, keteladanan, serta relasi pedagogis yang menekankan kedewasaan spiritual santri. Perbandingan antara konstruksi media dan data empiris mengungkap adanya jarak representasi yang dimediasi oleh pilihan diksi, sudut pandang, dan strategi penyajian visual, sehingga citra pesantren di ruang publik tidak sepenuhnya sejalan dengan praktik keseharian di lingkungan pesantren.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada penguatan literatur mengenai representasi pesantren dalam media dengan mengintegrasikan analisis wacana kritis dan perspektif epistemologi pesantren. Kajian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana struktur narasi media membentuk persepsi publik terkait otoritas keagamaan dan praktik pendidikan Islam tradisional, sekaligus menegaskan bahwa pesantren perlu dipandang bukan sebagai institusi budaya yang statis, melainkan sebagai ruang sosial yang hidup, dinamis, dan terus melakukan negosiasi makna di tengah disrupsi digital. Secara praktis, temuan penelitian menegaskan urgensi penguatan literasi media dan kapasitas komunikasi publik di lingkungan pesantren agar lembaga mampu mengelola informasi, mengantisipasi miskonsepsi, serta membangun narasi alternatif yang lebih proporsional. Bagi media, hasil penelitian ini menjadi rujukan untuk mendorong praktik jurnalisme yang lebih etis, berimbang, dan sensitif terhadap konteks kultural pesantren sehingga tidak terjebak pada simplifikasi ataupun eksotisasi tradisi keagamaan.

Ke depan, penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup kajian dengan membandingkan beberapa pesantren di berbagai daerah guna memperoleh temuan yang lebih komprehensif terkait pola representasi media. Pendekatan multimodal, termasuk analisis terhadap komentar publik di media sosial, juga perlu dikembangkan untuk menelaah bagaimana wacana media direproduksi, dinegosiasikan, atau bahkan ditantang oleh audiens. Pengembangan studi semacam ini penting untuk memperkuat ekosistem informasi yang cerdas dan adil dalam pemberitaan mengenai lembaga pendidikan Islam, sekaligus mendukung terbangunnya relasi yang lebih konstruktif antara pesantren, media, dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, M. Y., & Mardiyah, M. (2023). *Model Reproduksi Institusi Pesantren Modern dan Salaf di Era Modern* (1st Ed.). JDS.

Aisyah, S., Wardi, M., Gafur, A., Susanto, H., & Laili, L. (2023). Problematika Pendidikan Pesantren dan Solusi Alternatifnya Perspektif K.H. Zamakhsyari Dhofir. *Edupreneur: Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, *1*(1), 7–14. https://doi.org/10.28944/edupreneur.v1i1.705

Akhazi, E., Nazwa Azahra, R., & Sujana, M. (2025). Dinamika dan Faktor-Faktor Perubahan Stratifikasi Sosial di Banten. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, *3*(1), 143–148.

Alexanderandi, & Alifian, A. (2024). Sistem Pendidikan Feodalisme. *Journal of Information Systems and Management*, *3*(1), 23–25. https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.687

Amanda, A. L. (2021). Teori Framing: Pengaruh Media Baru terhadap Perubahan Sosial, Politik, Ekonomi. *Journal of Physical Therapy Science*, *9*(1), 17–23.

Andriani, R. D. (2024). Strategi Pemimpin dalam Digital Leadership di Era Disrupsi Digital. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, *14*(2), 58–72. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/al-irsyad

Arifin, A. Z. (2015). Transmitting Charisma: Re-Reading Weber through the Traditional Islamic Leader in Modern Java. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, *9*(2), 1–30.

Ayatullah, A., & Hasan, M. S. (2025). Tasawuf Epistemologis Gus Baha': Ilmu Sebagai Jalan Spiritual dalam Tradisi Pesantren Pendahuluan. *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf dan Peradaban Islam*, *5*(2), 1–12. https://doi.org/10.58572/hkm.v5i2.165

Bamasputri, R. A., Fitriani, I., Salsabila, A. A., & Prasetyaningsih, N. I. D. (2025). Transformasi Digital: Evolusi Komunikasi Massa di Era Media Sosial dan Dampaknya pada Perilaku Konsumsi Informasi Masyarakat. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD Stkip Subang*, *11*(2), 270–286. https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i02.6885

Fachrurrozi, M., & Ami'in, S. N. (2021). Krisis Epistemologis Pesantren dalam Kajian Pluralisme Agama. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, *10*(1), 39–58. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.274

Farihin, H., & Khasani, F. (2023). Etika Profetik Santri: Resepsi Hadis pada Tradisi Pendidikan Pesantren. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *9*(2), 113–128. https://doi.org/10.18860/jpai.v9i2.24128

Hasan, K., Husna, A., & Fitri, D. (2023). Transformasi Komunikasi Massa Era Digital Antara Peluang dan Tantangan. *JPP: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, *8*(1), 41–55.

Hasan, M. Z. (2024). Validitas Sosial Etika dalam Interaksi Pesantren di Media Sosial terhadap Persepsi Masyarakat. *Visionaria: Journal of Educational Innovation Management*, *1*(1), 35–50.

Hasanah, F. (2023). Lingkaran Keilmuan Ulama Pesantren Abad 17–18 (Analisis Buku *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 17–18* Karya Prof. Azyumardi Azra). *Tafhim Al-'Ilmi*, *14*(2), 310–320. https://doi.org/10.37459/tafhim.v14i2.6456

Herman. (2024). Pengaruh Komunikasi Digital terhadap Pola Komunikasi pada Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Modern. *Profesional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, *11*(2), 505–510. https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7139

Hidayat, A., Sujana, A., & Al Gadri, H. H. (2018). Representasi Sosial Komunitas Pesantren tentang Makna Kedamaian. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *12*(1), 107–126. https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.107-126

Hikam, F., & Ghifari, A. (2025). Adab Sebelum Ilmu: Reaktualisasi Nilai-Nilai Tarbiyah dalam Pendidikan Islam Dasar. *Journal Islamic Religious Education Research (Jirer)*, *1*(1), 12–28.

Jali, A. N., & W, U. R. (2024). Konsep Adab Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas. *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman*, *11*(1), 43–57. https://doi.org/10.31102/alulum.11.1.2024.43-57

Maizah, S., & Barizi, A. (2025). Epistemologi Kepemimpinan Transformasional dan Nilai-Nilai Tradisional Kiai dalam Membentuk Karakter Santri di Era Digital: Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Haramain Almaliki. *Irfani*, *21*(2), 517–533. https://doi.org/10.30603/irfani.v21i2.6715

Marlina, E. H., & Nugraha, M. S. (2025). Landasan Filosofis dalam Kebijakan Pendidikan Islam: Perspektif Epistemologis. *Journal of Social Science Research*, *5*(1), 4500–4514. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17161

Meisyaroh, S. (2014). Instant Messaging dalam Perspektif Ekologi Media dan Komunikasi. *Semiotika: Jurnal Komunikasi*, *8*(1), 118–130. https://doi.org/10.30813/s:jk.v8i1.961

Mutawakkil, N., & Barizi, A. (2024). Peran Kiai dalam Menghadapi Masyarakat Era Disrupsi: Epistemologi Kepemimpinan (Studi Kasus Pondok Pesantren Bustanul Makmur 2 Banyuwangi). *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(8), 9284–9292. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i8.5269

Natsir, A., Wahyudin, D., & Ulfa, D. L. (2024). Pembelajaran Rasional-Profetik untuk Anak Usia Dini. In *Annual Conference on Islamic Early Childhood Education (Iciece)* (Vol. 8, Pp. 219–230). https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/aciece/article/view/1695

Nur, A., Novela, D., Dona, R., Arina, M., & as, I. (2025). Transformasi Konseptual Masyarakat Kontemporer: Dialektika Neomodernisme dan Postmodernisme terhadap Rasionalitas dan Emansipasi Sosial di Era Digital. *Development: Journal of Community Engagement*, *4*(1), 299–314. https://doi.org/10.46773/djce.v4i1.2106

Nurrohmah, N. (2024). Respon Islam terhadap Modernitas Barat. *Journal of Islamic Education Management*, *4*(1), 480–490. https://doi.org/10.47476/manageria.v4i1.3729

Permadi, D., Muyassaroh, I. S., Purnaweni, H., & Widodo, A. S. (2024). Media Massa dan Kontruksi Realitas (Analisis Framing terhadap Pemberitaan UU IKN pada Media Online Tempo.Co dan Mediaindonesia.Com). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *22*(1), 1–?. https://doi.org/10.31315/jik.v22i1.7754

Prabowo, G., Ilmi, R. M., & Umam, M. K. (2024). Transformasi Pesantren Salaf dalam Wajah Modernisasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal (Jipkl)*, *4*(1), 64–72.

Putri, A. Y., Mariza, E., & Alimni, A. (2023). Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahirnya Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Sejarah Perkembangan Pesantren/Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini).

Innovative: Journal of Social Science Research, *3*(2), 6684–6697. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1140/857

Ramadhani, H., Wahyuni, L. N., & Ariani, F. D. (2025). Peran Pesantren dalam Menjaga Nilai-Nilai Spiritual di Tengah Modernisasi Pendidikan. *Journal of Islamic Education*, *1*(1), 53–63.

Ridha, M., & Irawan, M. A. (2025). Kapitalisme Digital dan Pendidikan Agama Islam: Telaah Kritis terhadap Transformasi Nilai dan Media Pembelajaran dalam Era Disrupsi Digital. *Tasqif: Journal of Islamic Pedagogy*, *2*(2), 37–48. https://doi.org/10.51590/tsqf.v2i2.36

Rohani, R. (2024). Transformasi Relasi Kyai dan Santri dalam Tradisi Pesantren (Kajian Sosiologi Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Purworejo). *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, *24*(2), 25–42. https://doi.org/10.32699/mq.v25i2.8208

Siswanto, H., Tobing, C. I., Fadhillah, R. R., Maharani, A., Paruda, V. T., Hariri, M. R., Nuraini, A. A., Sari, D., Pramesti, S. A., Ahma, C. W., Tiara, A., Ibrahim, M., & Luth, N. Z. (2024). Feodalisme dalam Wajah Modern: Studi Atas Penguasaan Tanah oleh Korporasi di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(4), 425–?. https://doi.org/10.5281/zenodo.14205494

Yaqin M.S, A. A. (2023). Analisis Framing Mediaindonesia.Com dan Detik.Com dalam Isu Endorse Jokowi pada Prabowo Subianto. *Medio: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *1*(2), 141–156. https://doi.org/10.56013/mji.v1i2.2480